

MANAJEMEN PEMULIHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI CIANJUR TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

SUHAETI¹, SYARKAWI², PIRMA WINDRA³, MUHAMMAD AKBAR MAULANA⁴,
MUHAMMAD DWI NURFAISAL⁵

Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Indonesia^{1,3,4,5}, Administrasi Negara, Universitas
Pamulang, Indonesia²

Email: dosen02977@unpam.ac.id¹, dosen03005@unpam.ac.id², dosen03370@unpam.ac.id³,
dosen02927@unpam.ac.id⁴, dosen03014@unpam.ac.id⁵

Abstract: *This study aims to examine how post-disaster recovery management for the 2022 Cianjur Earthquake was implemented, with a primary focus on the rehabilitation and reconstruction phases after the emergency response period ended. The method used is a literature study, namely by examining various written sources such as official government documents, reports from related institutions, laws and regulations-especially Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management-as well as scientific articles and publications relevant to post-disaster recovery issues. The discussion of this research focuses on the recovery process in Cianjur Regency, which includes physical, social, economic, and public service aspects, including how inter-agency coordination is carried out in the implementation of rehabilitation and reconstruction. The results of the study indicate that post-disaster recovery management for the Cianjur Earthquake has basically referred to the national regulatory framework, but in practice still faces various obstacles, such as weak coordination, inaccurate damage data, and slow recovery of the lives of affected communities. Through this research, it is hoped that it can provide both conceptual and practical contributions for local governments and stakeholders in strengthening post-disaster recovery management to be more effective, integrated, and sustainable in accordance with the provisions of laws and regulations.*

Keyword: *Post-Disaster Recovery, Cianjur Earthquake, Rehabilitation and Reconstruction, Disaster Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen pemulihan pascabencana Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022 dilaksanakan, dengan fokus utama pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat berakhir. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, peraturan perundang-undangan - terutama Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - serta artikel ilmiah dan publikasi yang relevan dengan isu pemulihan pascabencana. Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada proses pemulihan di Kabupaten Cianjur yang meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, termasuk bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen pemulihan pascabencana Gempa Bumi Cianjur pada dasarnya telah mengacu pada kerangka regulasi nasional, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi, ketepatan data kerusakan, serta lambatnya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat manajemen pemulihan pascabencana agar lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pemulihan Pascabencana, Gempa Bumi Cianjur, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Penanggulangan Bencana

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia, khususnya bencana gempa bumi. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-

Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi ketiga lempeng tersebut menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap aktivitas seismik yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan dampak kerusakan fisik, korban jiwa, serta gangguan sosial dan ekonomi dalam skala besar. Dalam perspektif administrasi publik, bencana alam tidak hanya dipahami sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan yang berkaitan erat dengan kapasitas negara dalam melindungi masyarakat dan memulihkan kehidupan pascabencana.

Salah satu peristiwa gempa bumi yang menimbulkan dampak signifikan terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada 21 November 2022. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 tersebut menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, infrastruktur publik, serta fasilitas sosial dan ekonomi. Dampak gempa tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan akibat besarnya jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Kondisi ini menjadikan Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022 sebagai salah satu bencana yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam tahap pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, dampak gempa bumi ini dapat dilihat dari tingginya jumlah korban dan kerusakan yang terjadi. Secara rinci, kondisi korban jiwa dan pengungsi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Korban dan Pengungsi Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022

Kategori Dampak	Jumlah
Meninggal dunia	334 orang
Hilang	8 orang
Luka berat	593 orang
Luka ringan	44 orang
Pengungsi	114.683 orang

Sumber: BPBD Kabupaten Cianjur, 2022

Selain korban jiwa, gempa bumi Cianjur juga mengakibatkan kerusakan fisik yang sangat signifikan. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada rumah tinggal masyarakat, tetapi juga pada berbagai fasilitas publik yang berperan penting dalam pelayanan dasar. Data kerusakan bangunan dan fasilitas publik disajikan pada Tabel 2.

Jenis Kerusakan	Jumlah
Rumah rusak berat	12.956 unit
Fasilitas kesehatan	18 unit
Fasilitas pendidikan	540 unit
Sarana ibadah	272 unit
Kantor/gedung pemerintahan	17 unit

Sumber: BPBD Kabupaten Cianjur, 2022

Besarnya jumlah kerusakan tersebut menunjukkan bahwa gempa bumi Cianjur tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga mengganggu sistem pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kerusakan fasilitas pendidikan berdampak pada terhentinya proses belajar mengajar, sementara kerusakan fasilitas kesehatan menghambat pelayanan medis bagi masyarakat terdampak. Kondisi ini memperkuat urgensi pelaksanaan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Dalam kerangka penanggulangan bencana, pemulihan pascabencana merupakan tahapan strategis yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi diarahkan pada pemulihan fungsi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, sedangkan rekonstruksi berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur fisik secara permanen dengan prinsip keamanan dan keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemulihan pascabencana secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Namun, berbagai pengalaman bencana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemulihan pascabencana seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antar lembaga, pendataan kerusakan, serta kapasitas pemerintah daerah.

Dalam konteks Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pemulihan, seperti penyediaan hunian sementara, pembangunan hunian tetap, serta pemulihan fasilitas publik. Meskipun demikian, proses pemulihan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, antara lain perbedaan data kerusakan antarinstansi, keterlambatan realisasi pembangunan, serta lambatnya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemulihan yang dirumuskan secara normatif dengan praktik implementasi di lapangan.

Penelitian mengenai pemulihan pascabencana telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, kajian pemulihan pascabencana umumnya diarahkan pada evaluasi kebijakan, peran pemerintah, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Beberapa penelitian terdahulu menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Studi yang dilakukan oleh Purwata, et al (2024) mengenai pemulihan pascabencana gempa Lombok menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemulihan yang baik secara normatif belum tentu menghasilkan outcome yang optimal apabila tidak didukung oleh kapasitas implementasi yang memadai.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suryani (2020) tentang pemulihan pascabencana gempa dan tsunami Palu menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut hasil penelitian tersebut, keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak. Namun demikian, penelitian ini lebih banyak menekankan aspek partisipatif dan belum mengkaji secara mendalam mekanisme manajemen pemulihan dari perspektif administrasi publik.

Selain itu, penelitian oleh Hidayat dan Nugroho (2021) yang mengkaji tata kelola pemulihan pascabencana banjir di wilayah perkotaan menemukan bahwa fragmentasi kewenangan antar lembaga pemerintah seringkali menimbulkan tumpang tindih program dan inefisiensi penggunaan anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana merupakan isu lintas sektor yang memerlukan koordinasi kebijakan yang kuat. Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada bencana banjir dan belum menyentuh konteks gempa bumi secara spesifik.

Dalam konteks regulasi, beberapa kajian normatif menilai bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pemulihan pascabencana. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif-deskriptif dan belum banyak mengkaji kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan praktik implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian pemulihan pascabencana lebih menitikberatkan pada aspek teknis rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, sementara analisis mengenai manajemen dan tata kelola kebijakan pemulihan dalam perspektif administrasi publik masih relatif terbatas.

Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji kasus bencana tertentu seperti gempa Lombok, gempa dan tsunami Palu, atau bencana banjir, sehingga kajian yang secara spesifik membahas Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022 masih sangat minim. Padahal, setiap bencana memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda, sehingga memerlukan analisis kontekstual yang spesifik.

Ketiga, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengaitkan secara sistematis antara kerangka regulasi nasional penanggulangan bencana dengan praktik implementasi pemulihan pascabencana di tingkat daerah. Kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan secara

normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan belum banyak dianalisis secara mendalam, khususnya pada fase pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting dalam mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis manajemen pemulihan pascabencana Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022 secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya memotret proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga mengevaluasi tata kelola kebijakan, koordinasi antaraktor, serta tantangan implementasi yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian manajemen bencana dan administrasi publik, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai praktik pemulihan pascabencana di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses manajemen pemulihan pascabencana Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam perspektif administrasi publik. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan kondisi empiris pemulihan pascabencana sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan kerangka kebijakan dan regulasi yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi.

Sumber data meliputi dokumen resmi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, serta dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Selain itu, data pendukung diperoleh dari artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang relevan dengan topik manajemen bencana dan kebijakan publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi analitis yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dengan kerangka regulasi dan teori yang digunakan untuk menilai efektivitas manajemen pemulihan pascabencana.

C. Hasil dan Pembahasan

Tahap pemulihan pascabencana merupakan fase krusial dalam siklus penanggulangan bencana karena menentukan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat terdampak. Dalam konteks Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022, fase pemulihan dimulai setelah status tanggap darurat dicabut dan beralih pada tahapan rehabilitasi serta rekonstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara normatif, kebijakan pemulihan pascabencana diarahkan untuk memulihkan kondisi masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara normal, bahkan lebih aman dibandingkan sebelum bencana terjadi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah menetapkan kerangka kebijakan pemulihan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pemulihan. Namun, dalam praktik implementasi, manajemen pemulihan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, serta ketepatan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat.

Rehabilitasi Pascabencana dalam Perspektif Kebijakan Publik

Rehabilitasi pascabencana Gempa Bumi Cianjur mencakup pemulihan fungsi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang terganggu akibat bencana. Dari aspek kebijakan publik, rehabilitasi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengembalikan kapasitas

pelayanan dasar negara kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, telah melakukan berbagai langkah rehabilitasi, antara lain pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan layanan psikososial, serta normalisasi aktivitas pemerintahan.

Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan koordinasi lintas sektor. Dalam praktiknya, rehabilitasi melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga organisasi non-pemerintah. Fragmentasi kewenangan ini seringkali menyebabkan tumpang tindih program dan ketidaksinkronan kebijakan di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan teori *policy implementation* yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan peran aktor dan mekanisme koordinasi yang efektif.

Selain itu, rehabilitasi sosial bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pemulihan. Program pemulihan cenderung berfokus pada aspek fisik dan administratif, sementara pemulihan sosial dan psikologis seringkali bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif lembaga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mengadopsi paradigma *people-centered recovery*.

Rekonstruksi Fisik dan Tantangan Implementasi

Rekonstruksi merupakan fase pemulihan yang berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur fisik secara permanen, termasuk rumah tinggal, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Dalam kasus Gempa Bumi Cianjur, rekonstruksi menjadi tantangan besar mengingat tingginya tingkat kerusakan rumah warga dan fasilitas publik. Pemerintah telah menetapkan skema bantuan pembangunan hunian tetap dengan klasifikasi tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kebijakan, rekonstruksi telah mengacu pada prinsip *build back better*, yaitu membangun kembali dengan standar keamanan yang lebih baik untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Namun, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah ketidaktepatan dan perbedaan data kerusakan antarinstansi. Perbedaan data ini berdampak langsung pada keterlambatan penyaluran bantuan dan memicu ketidakpuasan masyarakat.

Dari perspektif administrasi publik, permasalahan data mencerminkan lemahnya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi. Ketergantungan pada pendataan manual dan kurangnya pemutakhiran data secara berkala menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak optimal. Akibatnya, kebijakan rekonstruksi yang dirancang secara normatif seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemulihan Pascabencana

Koordinasi merupakan elemen kunci dalam manajemen pemulihan pascabencana karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda. Dalam kasus Gempa Bumi Cianjur, koordinasi dilakukan melalui mekanisme komando dan koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah daerah dengan dukungan BNPB dan kementerian terkait. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan secara optimal.

Salah satu masalah utama adalah belum adanya pembagian peran yang jelas dan terstandarisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam fase pemulihan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi, terutama terkait kewenangan pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan pemulihan.

Dalam perspektif teori *collaborative governance*, pemulihan pascabencana seharusnya dilaksanakan melalui kemitraan yang setara antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat ad hoc dan

belum dilembagakan secara sistematis. Akibatnya, potensi sumber daya non-pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat proses pemulihan.

Pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat pulih secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Gempa Bumi Cianjur berjalan relatif lambat. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, terutama di sektor informal dan pertanian, sementara program pemulihan ekonomi belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok terdampak.

Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan pemulihan pascabencana yang dirumuskan secara normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Secara regulatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam penanggulangan bencana, termasuk pemulihan pascabencana. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam analisis kebijakan. Kebijakan pemulihan pascabencana cenderung dirumuskan secara *top-down* oleh pemerintah pusat, sementara implementasinya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan kondisi lokal. Ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas lapangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pemulihan.

Manajemen pemulihan pascabencana Gempa Bumi Cianjur memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Penguatan sistem data dan informasi kebencanaan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Selain itu, pelembagaan mekanisme kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan agar pemulihan pascabencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dari perspektif administrasi publik, pemulihan pascabencana harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pemulihan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pemulihan pascabencana Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022 secara normatif telah mengacu pada kerangka kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaktepatan data kerusakan, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, sistem data kebencanaan yang terintegrasi, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Upaya ini penting agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Cianjur*. BNPB Republik Indonesia.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. (2022). *Laporan data dampak dan penanganan gempa bumi Kabupaten Cianjur tahun 2022*. BPBD Kabupaten Cianjur.
- Jaenul, J., Wulandari, N., Fatmawati, L., & Mastripa, M. (2025). SOSIALISASI PENTINGNYA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN BERBASIS GENDER DI KOTA SERANG. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 4(3).
- Lassa, J. A. (2018). Disaster governance in Indonesia: Progress, challenges, and issues. *Asian Journal of Environment and Disaster Management*, 10(1), 1–14.

- Maulana, M. A., & Syarkawi, S. (2025). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Ensiklopedia of Journal*, 7(2), 374-386.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Suryani, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemulihan pascabencana gempa dan tsunami Palu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 89–103.
- Syarkawi, S., & Maulana, M. A. (2025). ISU GENDER DALAM MANAJEMEN BENCANA DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 141-147.